



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI DAERAH (LAKIP)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

LAKIP merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategik yang telah ditetapkan.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2022 ini pada dasarnya merupakan Laporan Penyelenggaraan Umum Pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2021, merupakan upaya memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018 - 2023.

LAKIP tahun 2022 merupakan bahan umpan balik, pedoman dan petunjuk bagi pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan panitia serta stakeholder Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang untuk menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerjanya pada tahun 2023, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan transparansi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disahkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang menjadi suatu kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang utuh dapat terlaksana dengan baik.

Dengan segala kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan atau penyampaian LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2022 diharapkan saran dan pendapat semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaannya, akhirnya semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi dan menuntun kita untuk bersama-sama meningkatkan kinerja berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dalam berbuat yang terbaik bagi Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Januari 2023

SEKRETARIS DPRD

Dr. Akhmad Elvian
Pembina Utama Muda
NIP 196510141989031004

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BABI. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan LAKIP	10
1.5. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Stategis Perangkat Daerah	13
2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	28
3.3. Realisasi Anggaran	48
3.4. Personalia dan Sumber Daya Manuasia.....	52
3.5. Sarana Penunjang	57
BAB IV. PENUTUP.....	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Permasalahan.....	58
4.3. Strategi Pemecahan Masalah	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan

Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kewenangannya Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelayanan (fasilitas dan mediasi) terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Secara rinci tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1. Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD; dan

- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh alat kelengkapan DPRD.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, Sekretaris DPRD membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 - c. Bagian Keuangan.

Tugas, pokok dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- b) Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- c) Pelaksanaan lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum di lingkup Tata Usaha dan Kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a) Penyiapan data di lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b) Melaksanakan petunjuk teknis di lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;

- c) Pelaksanaan di lingkup umum dan kepegawaian yang meliputi penatausahaan naskah dinas, dan kearsipan; penyiapan bahan penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; penyusunan LAKIP sekretariat DPRD; pengaturan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD; pelayanan pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan sekretariat DPRD; Pengaturan akomodasi pimpinan dan anggota DPRD; pemberian pelayanan, pengaturan, pengelolaan, pengadaan perlengkapan dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.
- d) Penyelenggaraan dan pelaksanaan dilingkup kepegawaian, meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi dan pembinaan, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, diklat dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai) di lingkungan Sekretariat DPRD; pengadministrasian keanggotaan DPRD; pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan kepegawaian pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- e) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.

1.2 Sub Bagian Humas dan Protokol

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Fungsi Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- a) Penyiapan data di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c) Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol, meliputi fasilitas hubungan kerjasama DPRD dengan instansi Pemerintah, dan lembaga sosial lainnya; Pemberian pelayanan dan fasilitas aspirasi

masyarakat yang di tujukan kepada DPRD; Pemberian pelayanan dan fasilitas informasi pers yang ditujukan kepada masyarakat; Penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan serta anggota DPRD; Pelayanan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD; pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; Penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; Pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; Pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; Penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan

- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris DPRD di lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan.

Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
- b) Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan persidangan, dan Perundang-undangan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD.

2.1 Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Persidangan dan Risalah.

Fungsi Sub Bagian Persidangan dan Risalah:

- a) Penyiapan data lingkup Persidangan dan Risalah;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Persidangan dan Risalah;
- c) Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah yang meliputi pelayanan teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat; penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat; fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Persidangan dan Risalah.

2.2 Sub Bagian Perundang-undangan

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Perundang-undangan:

- a) Penyiapan data lingkup Perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perundang-undangan;
- c) Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Perundang-undangan yang meliputi penyediaan bahan referensi kepustakaan lingkup Perundang-undangan, dokumentasi dan pengarsipan hasil persidangan atau rapat; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perundang-undangan.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup Keuangan.

Kepala Bagian Keuangan memiliki tugas :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup keuangan;

2. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup keuangan ;
3. Pelaksanaan keuangan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi

Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian keuangan lingkup Anggaran.

Fungsi Sub Bagian Anggaran adalah :

- a) Penyiapan data lingkup Anggaran dan Verifikasi;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Anggaran dan Verifikasi;
- c) Pelaksanaan lingkup Anggaran dan Verifikasi yang meliputi penyusunan rencana, pengajuan dan pengadministrasian anggaran DPRD; Melaksanakan verifikasi (pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Anggaran dan Verifikasi.

3.2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

Fungsi Sub Bagian keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan adalah :

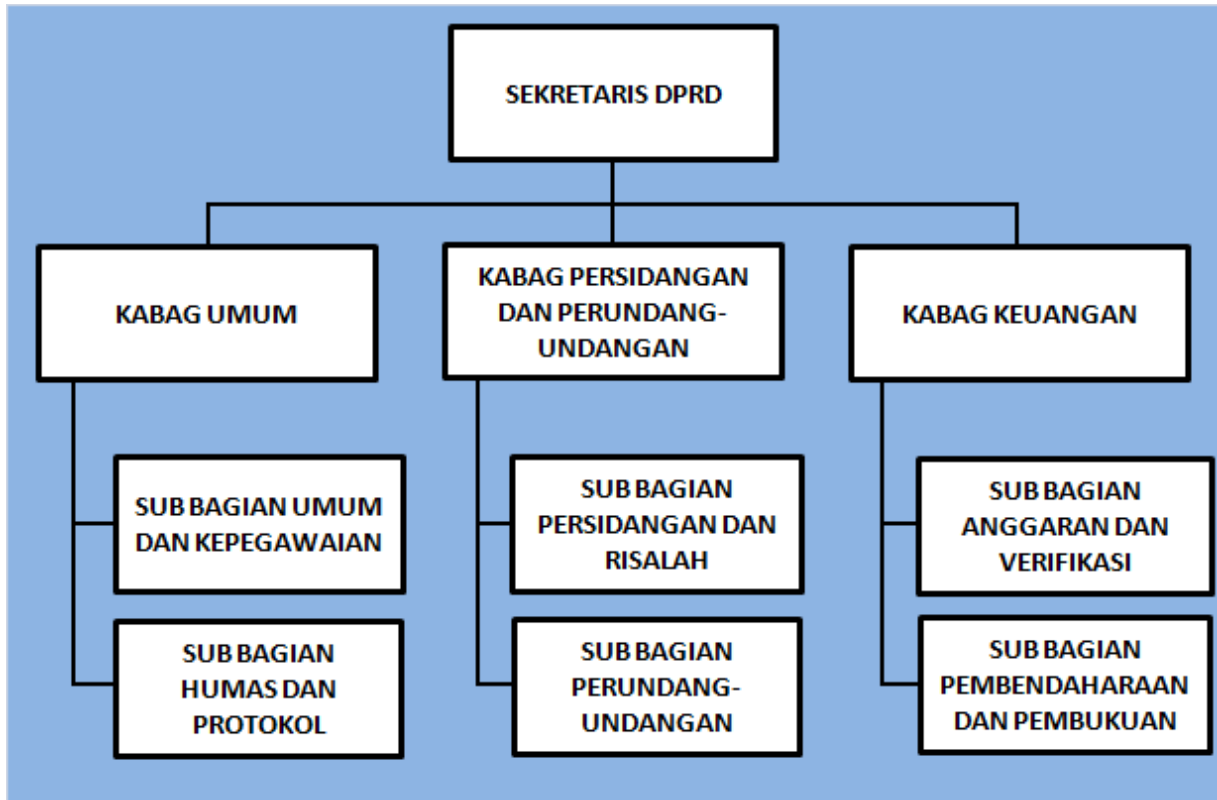
- a) Penyiapan data lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
- c) Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan pembukuan yang meliputi pembayaran gaji; Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; Pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD; serta penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;

1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Bagian Umum
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - Sub Bagian Perundangan-undangan
- d. Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam menjawab berbagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara periodik bagi pihak pemberi amanah atau delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Selain itu, penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi anatara lain:

- Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas menejerialnya.
- Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka mmenengah dan jangka pendek.

LAKIP yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang antara lain bermanfaat untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi;
- Umpan balik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan, nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
- Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan reposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.4 Sistematika Penyusunan LAKIP

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (tupoksi, struktur organisasi dan sumber daya manusia), maksud dan tujuan LAKIP serta sistematika penyusunan LAKIP dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tentang :

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan antara kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian misi Kota pangkalpinang

B. IKU Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

1. membandikan antara target dan realisasi tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya:
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

pad sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1.5. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam memfasilitasi dan mediasi adalah kurangnya pemahaman mengenai pedoman tata naskah dinas resmi, pengelolaan administrasi kepegawaian kurang memahami peraturan perundangan-undangan kepegawaian, belum terintegrasinya program dan kegiatan masing-masing bagian, kondisi prasarana yang masih kurang kondusif menyebabkan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor dari luar yang dominan adalah

intervensi “pihak luar” terhadap tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key succes factors*) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis dengan spesifikasi khusus (pendidikan dan latihan teknis manajemen keprotokolan, bimbingan teknis notulensi, bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, kursus-kursus dan melalui forum ilmiah).
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja dapat lebih dioptimalkan untuk memfasilitasi dan mediasi yang terbaik kepada anggota dewan.
3. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui peningkatan pengawasan melekat, serta penerapan reward and punishment sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) dan manajemen perkantoran yang berdaya guna dan berhasil guna.
5. Penambahan aparat keamanan melalui kerjasama yang baik dengan instansi terkait baik satpol pp dan pihak kepolisian dan TNI.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari Visi Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 perlu ditetapkan kebijakan yang merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Dilihat dari peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dimana fasilitas dan mediasi yang diberikan akan berimplikasi langsung terhadap kinerja Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang demi kepentingan publik yang terus berkembang atau berbanding lurus dengan perubahan paradigma yang terjadi dimasyarakat, maka ditetapkan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018 sebagai acuan kerja dan sebagai alat kendali serta sarana penilaian kualitas dan pendorong terwujudnya *Good Governance*, juga sebagai bagian dari upaya pencapaian Rencana Strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang, beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan yaitu:

- Misi: Misi menjadi 4
- Tujuan: Tujuan menjadi 4 karena menyesuaikan dengan misi
- Sasaran: Sasaran Menjadi 4 karena menyesuaikan dengan tujuan
- Indikator Kinerja : Indikator harus menggambarkan kalimat kondisi

2.1.1.1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis yang sudah dituangkan secara tegas dalam pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

V i s i

“Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Penghasil Peraturan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Terwujudnya Pangkalpinang sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”

2.1.1.2. Pernyataan Misi

Misi merupakan turunan, penerjemahan atau perincian secara lebih terfokus dari visi yang telah ditetapkan dengan demikian misi Sekretariat DPRD tidak bisa keluar dari lingkup atau pernyataan visi sehingga merupakan penjabaran dan bentuk yang lebih operasional dari visi

Misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang :

1. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD sesuai bidangnya masing-masing.
2. Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
3. Adanya kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD.
4. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan menyinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah menetapkan sejumlah tujuan yang relevan dengan masing-masing misi, yaitu:

1. Misi Pertama:
Tujuan:
Meningkatnya keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD
2. Misi Kedua:
Tujuan:
Tersedianya fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
3. Misi Ketiga
Tujuan:
Meningkatnya dukungan kontribusi bagi pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD.
4. Misi Keempat
Tujuan:
Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan menyinergikan hubungan antar badan legislatif dan

eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek dalam kegiatan operasional

1. Misi Pertama, Tujuan Pertama dijabarkan dalam sasaran: Meningkatnya keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing
2. Misi Kedua, Tujuan Kedua dijabarkan dalam sasaran: Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Misi Ketiga, Tujuan Ketiga dijabarkan dalam sasaran: Meningkatnya kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Misi Keempat, Tujuan Keempat dijabarkan dalam sasaran: Terjalannya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Tabel
TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya implementasi reformasi, birokrasi pemerintahan daerah	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Nilai	83

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2020	2021	2022
1.	Meningkatnya implementasi reformasi, birokrasi pemerintahan daerah	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan	Jumlah propemperda yang di ajukan dibagi dengan jumlah produk hukum yang dihasilkan dikali 100%	Nilai	79	81	83

2.1.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

2.1.3.1. Penetapan Kebijakan

Strategi mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Kebijakan merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - a) Bimbingan dan pengawasan dari atasan langsung masing-masing pegawai
 - b) Bimbingan teknis bagi para pegawai
 - c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan, wawasan serta kinerja
2. Kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan
 - a) Meningkatkan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada infrastruktur pelayanan.
 - b) Belanja aparatur diprioritaskan kepada belanja yang bersifat tetap dan tidak bisa dihindari seperti biaya pegawai, biaya non pegawai, biaya seperti biaya listrik, telpon dan lain-lain.
 - c) Penyusunan belanja harus disertai dengan tolok ukur kinerja yang mencerminkan rencana masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari masing-masing kegiatan
3. Kebijakan meningkatkan kualitas kontribusi pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pelayanan notulasi pada setiap Fraksi, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan serta Panitia Khusus
4. Kebijakan melaksanakan peningkatan komunikasi dan koordinasi berupa:
 - a) Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan fasilitasi terhadap rapat-rapat yang memediasi badan eksekutif dan legislatif
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan yang intensif kepada satuan kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan fungsi legislatif sebagai pengawas
 - c) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah yang dilakukan secara periodik dapat menjadi acuan bagi lembaga legislatif untuk memberi masukan

dan saran bagi pihak eksekutif agar bekerja lebih optimal.

2.1.4. Rencana Kerja

Evaluasi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2022 ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terutama dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 yakni mencakup :

1. Melakukan revisi Renstra OPD yang lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja;
2. Menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan;
3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai ukuran keberhasilan instansi agar lebih spesifik dan terukur sehingga dapat memberikan informasi yang jelas akan keberhasilan dalam mencapai sasaran;
4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen penetapan kinerja serta informasi mengenai berbagai perbandingan capaian kinerja;
5. Menyusun pedoman evaluasi/revisi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diatur dalam KemenPAN Nomor 135 Tahun 2004 serta melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang;
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhinya Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	Nilai	100	100	100	100

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

TABEL
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Jumlah Produk Hukum Yang dihasilkan	Jumlah Produk Hukum Yang dihasilkan	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.825.390.262	APBD Kota Pangkalpinang TA 2022
2	Program Dukungan Pelaksana Tugas Dan Fungsi Dprd	27.818.232.738	
TOTAL		57.643.623.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan setiap usaha masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes);

a. Input

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

b. Output

Output adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

c. Outcomes

Outcomes adalah segala sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

2. Capaian Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan prosentase tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Bobot Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan prosentase masing-masing unsur dalam setiap kelompok indikator kinerja. Bobot indikator kinerja setiap unsur harus 100%.

4. Nilai Capaian Indikator Kinerja

Merupakan nilai prosentase dari nilai bobot indikator kinerja dibagi nilai capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator pengukuran kinerja, target dan realisasinya yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) sebagaimana terlampir. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok; masukan, proses, keluaran dan hasil. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing

indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, unit, tahun, bulan, hari, jam, macam, jenis, paket, kali, tabung, eksemplar, jiwa, meter, set, stel, dokumen, persen, buku, lembar, dan sebagainya.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditentukan, dituangkan dalam formulir pengukuran pencapaian sasaran (PPS) sebagaimana terlampir.

Sedangkan uraian Indikator Kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 (berdasarkan Revisi Renstra 2018-2023) adalah sebagai berikut:

Tabel
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

No	Sararan Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan	Nilai	83

Tabel
Tabel Perbandingan Kinerja Tahun ini tahun lalu dan bebarapa tahun terakhir

Program	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program											
			2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
Urusan Pemerintahan Wajib														
Otonomi Daerah														
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan ketersediaan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	99,84%	100%	79,94%	100%	92,54%	100%	92,17%	100%	93,60%				
Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD										100%	94,60%	100%	90,61%

Tabel
Capaian Kinerja 2022

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
1		Sekretariat DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI KANTOR	%	100	93,57%	Rp 29.247.890.262	Rp 29.825.390.262	Rp 27.907.101.886			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	100	0,00%	Rp 5.300.000	Rp 5.300.000	Rp -	Seluruh OPD tidak melaksanakan kegiatan tersebut	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun	Dokumen	4	4	Rp 2.650.000	Rp 2.650.000	-	Seluruh OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	3	3	Rp 2.650.000	Rp 2.650.000	-	Seluruh OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	90,61%	Rp 8.463.286.049	Rp 8.422.546.049	Rp 7.631.891.460			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	40	90,68%	Rp 8.457.036.049	Rp 8.416.296.049	Rp 7.631.891.460			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	1	Rp 2.650.000	Rp 2.650.000	-	Seluruh OPD tidak	Kegiatan tidak dilaksana	

													melaks	kan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Dokumen	1	1	Rp 2.650.000	Rp 2.650.000	-	Seluruh OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	Rp 950.000	Rp 950.000	-	Seluruh OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	100	65,77%	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 65.770.954			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Orang	20	20	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 65.770.954			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%	100	81,04%	Rp 655.957.250	Rp 745.957.250	Rp 604.524.319			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	15	15	Rp 25.806.000	Rp 45.806.000	Rp 40.630.000			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	2	2	Rp 313.971.250	Rp 363.971.250	Rp 335.825.000			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Unit/set	15	15	Rp 139.680.000	Rp 159.680.000	Rp 111.530.000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 buku/koran	2	2	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 19.236.000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Orang	1500	1000	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000	Rp 8.325.000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan	Kali	20	20	Rp 110.000.000	Rp 110.000.000	Rp 73.978.319			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website/ aplikasi yang dikelola	Kali	2	2	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	93,85%	Rp 100.000.000	Rp 390.740.000	Rp 366.718.983			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	Unit/set	15	15	Rp 100.000.000	Rp 390.740.000	Rp 366.718.983			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang	%	100	91,94%	Rp 857.896.835	Rp 877.896.835	Rp 807.164.335			

				Daerah	Urusan Pemerintah Daerah														
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Orang	170	170	Rp 253.000.555	Rp 253.000.555	Rp 199.231.335								
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Unit/set	100	100	Rp 119.000.000	Rp 119.000.000	Rp 118.735.000								
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	20	20	Rp 485.896.280	Rp 505.896.280	Rp 489.198.000								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	69,21%	Rp 645.732.900	Rp 645.732.900	Rp 446.917.066								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	1	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 19.465.568								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	12	12	Rp 457.826.900	Rp 457.826.900	Rp 403.486.306								
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang di pelihara	Unit	2	2	Rp 137.906.000	Rp 137.906.000	Rp 23.965.192								
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase terpenuhinya layanan Keuangan dan Kesejahteraan	%	100	96,91%	Rp 18.169.717.228	Rp 18.387.217.228	Rp 17.819.814.769								
				Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	30	30	Rp 17.573.467.228	Rp 17.723.467.228	Rp 17.327.739.192								
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian yang disediakan	Stel	120	120	Rp 241.250.000	Rp 278.750.000	Rp 277.500.000								
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up	Orang	30	30	Rp 355.000.000	Rp 385.000.000	Rp 214.575.577								
				Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)	persentase terpenuhinya layanan Administrasi DPRD	%	100	65,72%	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 164.300.000								
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	Kali	3	3	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 164.300.000								
2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100	90,61%	Rp 25.908.232.738	Rp 27.818.232.738	Rp 25.206.033.256								
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan	%	100	79,88%	Rp 5.099.750.000	Rp 6.471.250.000	Rp 5.169.346.788								
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan Peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas	Perda	24	24	Rp 5.099.750.000	Rp 6.471.250.000	Rp 5.169.346.788								
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	100	79,35%	Rp 5.726.014.138	Rp 4.856.014.138	Rp 3.853.114.636								
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	Kali	6	6	Rp 3.928.566.938	Rp 2.928.566.938	Rp 1.948.064.636								
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya dokumentasi DPRD	Jenis	2	2	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000								
				Penyediaan Kelompok Pakar	Tersedianya Kelompok Pakar	Orang	10	10	Rp	Rp	Rp								

				dan Tim Ahli	dan Tim Ahli				600.000.000	630.000.000	620.000.000			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedianya Tenaga ahli Fraksi	Orang	40	40	Rp 1.192.447.200	Rp 1.292.447.200	Rp 1.280.050.000			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	100	82,32%	Rp 137.088.000	Rp 136.988.000	Rp 112.763.250			
				Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	Kali	3	3	Rp 137.088.000	Rp 136.988.000	Rp 112.763.250			
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan kerjasama daerah yang dilakukan	%	100	86,22%	Rp 1.317.964.800	Rp 1.626.564.800	Rp 1.402.505.000			
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan	Jenis	3	3	Rp 1.317.964.800	Rp 1.626.564.800	Rp 1.402.505.000			
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan	%	100	99,60%	Rp 13.627.415.800	Rp 14.727.415.800	Rp 14.668.303.582			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas, DPRD	Jumlah Rapat rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti	Kali	60	60	Rp 13.000.000.000	Rp 14.000.000.000	Rp 13.954.703.582			
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	Laporan	1	1	Rp 627.415.800	Rp 727.415.800	Rp 713.600.000			
TOTAL									Rp 55.156.123.000	Rp 57.643.623.000	Rp 53.113.135.142			

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD

No	Uraian	Rumus	Satuan Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Perda Yang disahkan	Jumlah Perda yang disahkan	Perda	15	16	15	18	20	24
2	Jumlah Kegiatan Reses Anggota DPRD Per Tahun	jumlah kegiatan reses yang terlaksana	keg	3	3	3	3	3	3
3	Presentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	jumlah rapat dewan tepat waktu yang terlaksana	%	80	80	80	80	80	92
4	Nilai IKM/SKM bidang pelayanan setwan terhadap DPRD		nilai	77	77	80	79	81	85

3.2. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja ini untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijaksanaan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2022, implementasi Rencana Strategis 2018 - 2023 mencakup pelaksanaan 14 (empat belas) kegiatan dengan 34 (tiga puluh lima) sub kegiatan dalam 2 (dua) program untuk mendukung 5 (lima) sasaran strategis. Capaian kinerja selama tahun 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kepuasan DPRD	Nilai	81	81	83	83

Kepuasan DPRD yang menjadi target 2022 adalah 83 dan terealisasi sebesar 83, jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka perda mengalami peningkatan sebesar 2 Nilai. Usaha pencapaian indikator kepuasan DPRD didukung oleh 2 (lima) program dengan 5 Sasaran.

SASARAN 1

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	98,18%	100	90,56%

Indikator sasaran Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu

dengan realisasi 90,56 % dibanding dengan tahun 2021 dengan realisasi 98,18%.

pada indikator Sasaran Persentase laporan Kinerja & keuangan yang disampaikan tepat Waktu didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut :

N O	Indikator Kinerja	Satua n	Targ et	Realisasi			
				2021		2022	
				Rp	%	Rp	%
1	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	-	0,00 %	-	0,00 %
2	Administras i Keuangan Perangkat Daerah	%	100	7.015.028.7 47	98,18 %	7.631.891.4 60	90,61 %

SASARAN 2

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	%	100	90,90%	100	65,77%

Indikator sasaran Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dengan realisasi sebesar 65,77% jauh mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 90,90% pada indikator Sasaran Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
				2021		2022	
				Rp	%	Rp	%
1	Administrasi Kepegawaian	%	100	50.020.200	90,90%	65.770.954	65,77%

Perangkat Daerah						
------------------	--	--	--	--	--	--

SASARAN 3

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	93,82%	100	81,04%

Indikator sasaran Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dengan realisasi sebesar 81,04% jauh mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 93,82% pada indikator Sasaran Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
				2021		2022	
				Rp	%	Rp	%
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	461.859.551	93,82%	604.524.319	81,04%

SASARAN 4

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	90,98%	100	95,39%

Indikator sasaran Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu dengan realisasi sebesar 95,39% dibanding dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 90,98% pada indikator Sasaran Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik didukung oleh 5 kegiatan sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
				2021		2022	
				Rp	%	Rp	%
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	-		366.718.983	93,85%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	730.754.809	87,45%	807.164.335	91,94%
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	370.735.071	63,88%	446.917.066	69,21%
4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	15.178.517.402	91,18%	17.819.814.769	96,91%
5	Layanan Administrasi DPRD	%	100	87.500.000	63,11%	164.300.000	65,72%

SASARAN 5

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	94,60%	100	90,61%

Indikator Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dengan realisasi sebesar 90,61% dibanding dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 94,60% pada indikator Sasaran Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran didukung oleh 5 kegiatan sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
				2021		2022	
				Rp	%	Rp	%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	3.943.954.627	99,94%	5.169.346.788	79,88%
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	3.573.984.330	80,39%	3.853.114.636	79,35%
3	Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	92.219.500	70,63%	112.763.250	82,32%
4	Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	1.221.875.000	88,17%	1.402.505.000	86,22%
5	Fasilitas Tugas DPRD	%	100	10.644.686.614	99,68%	14.668.303.582	99,60%

Tabel Analisis Pencapaian 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Daerah	Target	Realisasi
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	100%	83%

Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang memiliki tujuan yaitu Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN sedangkan Indikator Sasaran/Daerah yaitu Rata-rata Nilai IKM belum mencapai target dengan nilai Realisasi 83%. Usaha pencapaian indikator tersebut, Sekretariat DPRD didukung oleh 2 (dua) program.

2 (dua) program pencapaian indikator diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian/Indikator Kinerja	Satuan / Target	Anggaran	Realisasi	Pencapaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	100%	Rp 29.825.390.262	Rp 27.907.101.886	93,57%
Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	Rp 8.427.846.049	Rp 7.631.891.460	90,56%
Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 5.300.000	Rp -	0,00%
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 8.422.546.049	Rp 7.631.891.460	90,61%
Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	100%	Rp 100.000.000	Rp 65.770.954	65,77%
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 100.000.000	Rp 65.770.954	65,77%
Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Rp 745.957.250	Rp 604.524.319	81,04%
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 745.957.250	Rp 604.524.319	81,04%

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Rp 20.551.586.963	Rp 19.604.915.153	95,39%
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 390.740.000	Rp 366.718.983	93,85%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 877.896.835	Rp 807.164.335	91,94%
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 645.732.900	Rp 446.917.066	69,21%
Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	Rp 18.387.217.228	Rp 17.819.814.769	96,91%
Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	100%	Rp 250.000.000	Rp 164.300.000	65,72%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	Rp 27.818.232.738	Rp 25.206.033.256	90,61%
Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100%	Rp 27.818.232.738	Rp 25.206.033.256	90,61%

Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	Rp 6.471.250.000	Rp 5.169.346.788	79,88%
Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	Rp 4.856.014.138	Rp 3.853.114.636	79,35%
Jumlah Laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	Rp 136.988.000	Rp 112.763.250	82,32%
Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	Rp 1.626.564.800	Rp 1.402.505.000	86,22%
Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	Rp 14.727.415.800	Rp 14.668.303.582	99,60%

Urusan Wajib yang dilaksanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 29.247.890.262,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) ditambahkan anggaran perubahan sebesar Rp. 577.500.000 menjadi Rp. 29.825.390.262 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) meliputi kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan yaitu persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah semua OPD tidak melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

perangkat daerah. Indikator kinerja yaitu jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah semua OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut, sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Indikator kinerja yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah semua OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut, sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 8.463.286.049 (delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) dikurangi pada anggaran perubahan sebesar Rp. 40.740.000 menjadi Rp. 8.422.546.049 (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp. 7.631.891.460. Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja yaitu persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan. Target kinerja 100% dengan pencapaian kinerja 90,61%. Meliputi sub kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 8.457.036.049 (delapan milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 40.740.000 menjadi Rp. 8.416.296.049 (delapan milyar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 7.631.891.460 atau 90,68% terdiri dari belanja gaji pokok sebesar Rp. 1.719.498.100. Belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp. 172.195.914. Belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 126.630.000. Belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp. 2.868.000. Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp. 64.305.000. Tunjangan beras PNS sebesar Rp. 112.830.360. Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 112.830.360. Belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp.

22.362. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp. 1.432.380.000. Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebesar Rp. 17.220.000. Belanja tunjangan komunikasi isentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.780.000.000. Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp. 201.600.000,00. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Indikator Kinerja yaitu jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya, dengan target kinerja 40 orang dengan pencapaian 38 orang.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sasaran kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Indikator kinerja yaitu jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah semua OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut, sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sasaran kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Indikator kinerja yaitu jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah semua OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut, sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

4) Penyusunan Laporan dan Analissi Prognosis Realisasi Anggaran

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran SKPD. Indikator kinerja yaitu jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah semua OPD tidak melaksanakan sub kegiatan tersebut, sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 65.770.954. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah. Indikator kinerja yaitu persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan target

kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 65,77%. Meliputi sub kegiatan:

- 1) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 65.770.954 atau 65,27%. Terdiri dari belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp. 25.000.000. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 40.770.954. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja yaitu jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dengan target kinerja 20 orang sedangkan pencapaian kinerja 20 orang.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 655.957.250 (enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 90.000.000 menjadi Rp. Rp. 745.957.250 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 604.524.319. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja yaitu Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 81,04%. Meliputi sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 25.806.000 (dua puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 45. 806.000 (empat puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 40.630.000 atau 88,70%. Sasaran kinerja yaitu, terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Indikator kinerja yaitu jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target kinerja 15 jenis sedangkan pencapaian kinerja 15 jenis.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 313.971.250 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 363.971.250 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 335.825.000 atau 92,27% terdiri dari belanja alat/bahn untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp.116.017.000, belanja makanan dan inuman rapat sebesar Rp. 110.775.000, belanja

makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 109.033.00. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor. Indikator kinerja yaitu jumlah bahan logistik yang disediakan. Target kinerja 2 jenis sedangkan pencapaian kinerja 2 jenis.

3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 139.680.000 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 159.680.000 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 111.530.000 atau 69,58%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan. Indikator kinerja yaitu jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Target kinerja 15 unit/set sedangkan pencapaian kinerja 15 unit/set.

4) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 19.236.000 atau 80,15%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja yaitu jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Target kinerja 2 buku/koran sedangkan pencapaian kinerja 2 buku/koran.

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 8.325.000 atau 37%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu. Indikator kinerja yaitu jumlah tamu yang berkunjung. Target kinerja 1500 orang sedangkan pencapaian kinerja 1000 orang.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh juta ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 73.978.319 atau 67,25%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator kinerja yaitu jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan. Target kinerja 20 kali sedangkan pencapaian kinerja 20 kali.

7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 15.000.000 atau 75%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD. Indikator kinerja yaitu jumlah

website/aplikasi yang dikelola. Target kinerja 2 kali sedangkan pencapaian kinerja 2 kali.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 290.740.000 menjadi Rp. Rp.390.740.000 (tiga ratus sembilan puluh jutatujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja yaitu persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah dengan target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 93,85%%. Meliputi sub kegiatan :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 290.740.000 menjadi Rp. Rp.390.740.000 (tiga ratus sembilan puluh jutatujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 366.718.983 atau 93,85%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerja yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan. Target kinerja yaitu 15 unit/set dengan pencapaian kinerja yaitu 15 unit/set.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 857.896.835 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 877.896.835 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 807.164.335. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja yaitu persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 91,94%. Meliputi sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 253.000.555 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 199.231.335 atau 78,75%, terdiri dari belanja tagihan telepon sebesar Rp. 2.262.891. Belanja tagihan listrik sebesar Rp. 136.789.588. Belanja kawat/faximile/internet/tv berlangganan sebesar Rp. 60.178.856. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Indikator kinerja yaitu jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani. Target kinerja yaitu 170 orang pencapaian kinerja yaitu 170 orang.

2) Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 118.735.000 atau 98,78% terdiri dari belanja suku cadang lainnya sebesar Rp. 57.460.000. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer sebesar 48.805.000. Belanja pemeliharaan komputer peralatan personal computer sebesar Rp. 12.470.000. Sasaran kinerja yaitu tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator kinerja yaitu jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki. Target kinerja yaitu 100 unit/set dengan pencapaian kinerja yaitu 100 unit/set.

3) Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 485.896.280 (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 505.896.280 (lima ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 489.198.000 atau 96,7% terdiri dari Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp. 42.973.000. Belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 237.900.000. Belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 208.325.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan jasa layanan umum kantor. Indikator kinerja yaitu jumlah jasa pelayanan umum kantor. Target kinerja 20 jenis sedangkan pencapaian kinerja 20 jenis.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 645.732.900 (enam ratus lima dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 446.917.066. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Indikator kinerja yaitu persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 69,21%. Meliputi sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 19.465.568 atau 38,93%. Sasaran kinerja

yaitu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Indikator kinerja yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara. Target kinerja yaitu 1 unit dengan pencapaian kinerja yaitu 1 unit.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 457.826.900 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 403.486.306 atau 88,13%. Terdiri dari belanja jasa tenaga supir sebesar Rp. 139.300.000, belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp. 46.538.400, belanja pemeliharaan alat angkutan- alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 217.647.906. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Indikator kinerja yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara. Target kinerja yaitu 12 unit dengan pencapaian kinerja yaitu 12 unit.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 137.906.000 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 23.965.192 atau 17,38%. Terdiri dari belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 9.430.192 dan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor- alat kantor lainnya sebesar Rp. 14.535.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Indikator kinerja yaitu jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara. Target kinerja yaitu 2 unit dengan pencapaian kinerja yaitu 2 unit.

6. Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 18.169.717.228 (delapan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 217.500.000 menjadi Rp. 18.387.217.228 (delapan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 17.819.814.769. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD. Indikator Kinerja yaitu persentase layanan keuangan dan kesejahteraan. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 96,91%. Meliputi sub kegiatan:

1) Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 17.573.467.228 (tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 17.723.467.228 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh dua ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 17.327.739.192 atau 97,77% terdiri dari belanja uang refresentasi DPRD sebesar Rp.671.790.000. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.73.588.200. Belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.79.951.680. Belanja uang paket DPRD sebesar Rp.57.582.000. Belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.974.095.500,00. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.101.776.350. Belanja tunjangan reses sebesar Rp.945.000.000. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 315.462,00.. Belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp. 7.676.340.000. Belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp. 6.747.300.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya terlaksananya penyelenggara administrasi keuangan DPRD. Indikator kinerja yaitu jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya. Target kinerja 30 orang sedangkan pencapaian kinerja 30 orang.

2) Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 241.250.000 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 37. 500.000 menjadi Rp. Rp. 278.750.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan Rp. 277.500.000 atau 99,55% terdiri dari belanja pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp. 60.000.000, belanja pakaian dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 60.000.000, dan Belanja pakaian adat daerah sebesar Rp. 82.500.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD). Indikator kinerja yaitu jumlah pakaian yang sediakan. Target kinerja 120 stel sedangkan pencapaian kinerja 120 stel.

3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 30.000.000 menjadi Rp. Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp.214.575.577 atau 55,73%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya medical check up DPRD. Indikator kinerja yaitu jumlah terlaksananya medical check up. Target kinerja 30 orang sedangkan pencapaian kinerja 30 orang.

7. Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 164.300.000. Sasaran kinerja terlaksananya layanan administrasi DPRD. Indikator kinerja yaitu persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 65,72%. Meliputi sub kegiatan:

1) Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 164.300.000 atau 65,72% terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 20.600.000, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp. 76.500.000, honorarium narasumber atau pembahas moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp. 1.200.000, belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp. 9.000.000, Belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp. 23.000.000, belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp. 20.000.000, belanja sewa kursi kerja pejabat sebesar Rp. 10.000.000 dan belanja sewan alat studi lainnya sebesar Rp. 4.000.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD. Indikator kinerja yaitu jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan. Target kinerja 3 kali sedangkan pencapaian kinerja 3 kali.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 25.908.232.738 (dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ributujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.910.000.000 menjadi Rp. Rp. 27.818.232.738 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) meliputi kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.099.750.000 (lima milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.371.500.000 menjadi Rp. Rp. 6.471.250.000 (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 5.169.346.788. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 79,88%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya layanan administrasi DPRD. Indikator kinerja yaitu persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang di sahkan. Meliputi sub kegiatan :

1) Pembahasan Rancangan Peraturan daerah

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.099.750.000 (lima milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.371.500.000 menjadi Rp. Rp. 6.471.250.000 (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 5.169.346.788 atau 79,88%. Terdiri dari belanja alat/bahan kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 13.300.000 dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.5.156.046.788. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah. Indikator kinerja yaitu jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas. Target kinerja 24 perda sedangkan pencapaian kinerja 24 perda.

2. Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.726.014.138 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 870.000.000 menjadi Rp. 4.856.014.138 (empat milyar delapan ratus lima puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.853.114.636. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD. Indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kapasitas DPRD. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 79,35%. Meliputi sub kegiatan:

1) Pendalaman Tugas DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 3.928.566.938 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.000.000.000 menjadi 2.928.566.938 (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.948.064.636 atau 66,52%, terdiri dari belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp. 664.500.000. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.283.564.636. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pendalaman tugas DPRD. Indikator kinerja yaitu jumlah pendalaman tugas DPRD yang diikuti. Target kinerja 6 kali sedangkan pencapaian kinerja 6 kali.

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 5.000.000 atau 100%. (lima juta rupiah) terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 5.000.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya publikasi dan

dokumentasi dewan. Indikator kinerja yaitu tersedianya kelompok pakar dan tim ahli. Target kinerja 2 jenis sedangkan pencapaian kinerja 2 jenis.

3) Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 30000.000 menjadi Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 620.000.000 atau 98,41%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyediaan kelompok pakar dan tim ahli. Indikator kinerja yaitu tersedianya kelompok pakar dan tim ahli. Target kinerja 10 orang sedangkan pencapaian kinerja 10 orang.

4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 1.192.447.200 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.292.447.200 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.280.050.000 atau 99,04% terdiri dari belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 860.050.000. Belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp. 420.000.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyeiaan tenaga ahli fraksi. Indikator kinerja yaitu tersedianya tenaga ahli fraksi dan tenaga administrasi . Target kinerja 40 orang kali sedangkan pencapaian kinerja 40 orang.

3. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 137.088.000 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu) berkurang pada anggran perubahan sebesar Rp. 100.000 menjadi Rp 136.988.000 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 112.763.250. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Indikator kinerja yaitu persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 82,32%. Meliputi sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Reses

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 137.088.000 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu) berkurang pada anggran perubahan sebesar Rp. 100.000 menjadi Rp 136.988.000 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 112.763.250 atau 82,32% terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor

sebesar Rp. 5.350.000. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 5.948.250. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 101.465.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pelaksanaan kegiatan reses. Indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan. Target kinerja 3 kali sedangkan pencapaian kinerja 3 kali.

4. Pembahasan Kerjasama Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 1.317.964.800 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 308.600.000 menjadi Rp. 1.626.564.800 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.402.505.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya pembahasan kerjasama daerah. Indikator kinerja yaitu persentase kerjasama daerah yang dilakukan. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 86,22%. Meliputi sub kegiatan:

1) Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 1.317.964.800 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 308.600.000 menjadi Rp. 1.626.564.800 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.402.505.000 atau 86,22% terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 189.355.000. Belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 601.450.000. Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan sebesar Rp. 611.700.000. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi. Indikator kinerja yaitu jumlah jenis jasa mass media yang digunakan . Target kinerja 3 jenis sedangkan pencapaian kinerja 3 jenis.

5. Fasilitas Tugas DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 13.627.415.800 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.100.000.000 menjadi Rp. 14.727.415.800 (empat belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 14.668.303.582. Dengan sasaran kinerja yaitu terlaksananya fasilitasi tugas DPRD. Indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan . Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 99,60%.

1) Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 13.954.703.582 atau 99,68%. Sasaran kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Indikator kinerja yaitu jumlah rapat-rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti. Target kinerja 60 kali sedangkan pencapaian kinerja 60 kali.

2) Penyusunan laporan kinerja DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 627.415.800 (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 727.415.800 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 713.600.000 atau 98,10%. Sasaran kinerja yaitu jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD. Target kinerja 1 laporan sedangkan pencapaian kinerja 1 laporan.

3.3. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2022 adalah sebesar Rp. 53.113.135.142 atau 92,14 % dari Anggaran 57.643.623.000 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel.
Realisasi Anggaran 2022

No	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4		5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 29.825.390.262	Rp 27.907.101.886	93,57	Rp 1.918.288.376
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.300.000	Rp -	-	Rp 5.300.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.650.000	-		

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.650.000	-		
2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.422.546.049	Rp 7.631.891.460	90,6 1	Rp 790.654.589
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.416.296.049	Rp 7.631.891.460	90,6 8	Rp 784.404.589
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.650.000	-		
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp 2.650.000	-		
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 950.000	-		
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	Rp 65.770.954	65,7 7	Rp 34.229.046
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 100.000.000	Rp 65.770.954	65,7 7	Rp 34.229.046
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 745.957.250	Rp 604.524.319	81,0 4	Rp 141.432.931
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 45.806.000	Rp 40.630.000	88,7 0	Rp 5.176.000
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 363.971.250	Rp 335.825.000	92,2 7	Rp 28.146.250
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 159.680.000	Rp 111.530.000	69,8 5	Rp 48.150.000
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 24.000.000	Rp 19.236.000	80,1 5	Rp 4.764.000
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 22.500.000	Rp 8.325.000	37,0 0	Rp 14.175.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Rp 110.000.000	Rp 73.978.319	67,2	Rp 36.021.681

			dan Konsultasi SKPD			5	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	75,0 0	Rp 5.000.000
	5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 390.740.000	Rp 366.718.983	93,8 5	Rp 24.021.017
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 390.740.000	Rp 366.718.983	93,8 5	Rp 24.021.017
	6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 877.896.835	Rp 807.164.335	91,9 4	Rp 70.732.500
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 253.000.555	Rp 199.231.335	78,7 5	Rp 53.769.220
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 119.000.000	Rp 118.735.000	99,7 8	Rp 265.000
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 505.896.280	Rp 489.198.000	96,7 0	Rp 16.698.280
	7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 645.732.900	Rp 446.917.066	69,2 1	Rp 198.815.834
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 50.000.000	Rp 19.465.568	38,9 3	Rp 30.534.432
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 457.826.900	Rp 403.486.306	88,1 3	Rp 54.340.594
		3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 137.906.000	Rp 23.965.192	17,3 8	Rp 113.940.808
	8		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 18.387.217.228	Rp 17.819.814.769	96,9 1	Rp 567.402.459
		1	Penyelenggara	Rp	Rp		Rp

		Administrasi Keuangan DPRD	17.723.467.228	17.327.739.192	97,77	395.728.036
	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 278.750.000	Rp 277.500.000	99,55	Rp 1.250.000
	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 385.000.000	Rp 214.575.577	55,73	Rp 170.424.423
	9	Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)	Rp 250.000.000	Rp 164.300.000	65,72	Rp 85.700.000
	1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 250.000.000	Rp 164.300.000	65,72	Rp 85.700.000
B		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 27.818.232.738	Rp 25.206.033.256	90,61	Rp 2.612.199.482
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 6.471.250.000	Rp 5.169.346.788	79,88	Rp 1.301.903.212
	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 6.471.250.000	Rp 5.169.346.788	79,88	Rp 1.301.903.212
	2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 4.856.014.138	Rp 3.853.114.636	79,35	Rp 1.002.899.502
	1	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 2.928.566.938	Rp 1.948.064.636	66,52	Rp 980.502.302
	2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00	Rp -
	3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 630.000.000	Rp 620.000.000	98,41	Rp 10.000.000
	4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 1.292.447.200	Rp 1.280.050.000	99,04	Rp 12.397.200
	3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 136.988.000	Rp 112.763.250	82,32	Rp 24.224.750
	1	Pelaksanaan Reses	Rp 136.988.000	Rp 112.763.250	82,32	Rp 24.224.750
	4	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp 1.626.564.800	Rp 1.402.505.000	86,22	Rp 224.059.800
	1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan	Rp 1.626.564.800	Rp 1.402.505.000	86,2	Rp 224.059.800

		Publikasi			2	
5		Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 14.727.415.800	Rp 14.668.303.582	99,60	Rp 59.112.218
	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas, DPRD	Rp 14.000.000.000	Rp 13.954.703.582	99,68	Rp 45.296.418
	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp 727.415.800	Rp 713.600.000	98,10	Rp 13.815.800
TOTAL			Rp 57.643.623.000	Rp 53.113.135.142	92,14	Rp 4.530.487.858

3.4. Personalia dan Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang memiliki Personalia/ Sumber Daya Manusia berjumlah dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan. Untuk jelasnya seperti di bawah ini:

3.2.1. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	-	-	-	1	1
II	1	2	-	9	12
III	8	5	4	5	22
IV	-	2	1	-	3
Total	9	9	5	15	38

3.2.2. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	10
2.	Jabatan Staf	27
3.	Jabatan fungsional	1
	Total	38

3.2.3. Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SD Sederajat	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	9	4	13
4	D3	2	4	6
5	D4	-	-	-

6	S1	9	7	16
7	S2	2	-	2
8	S3	-	-	-
	TOTAL	23	15	38

3.2.4. Pegawai Harian Lepas

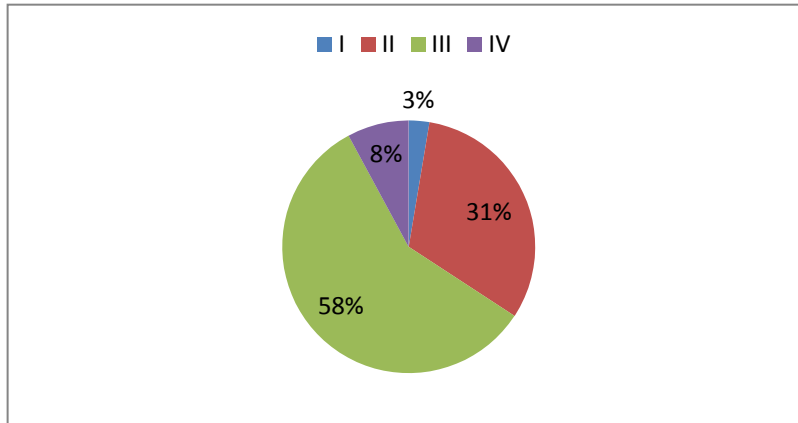
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Budi Triyanto	L
2	Subarkat	L
3	Refiardi	L
4	Genta Mahardhika, SE	L
5	Dasa Novianto	L
6	Awal Susilo, S.Kom.I	L
7	Sumaryati	P
8	Fatimah	P
9	Pramediando, SE	L
10	Bela Novianti	P
11	Anugrah Eko Saputra	L
12	Yogi Apria Hutama, S.A.P	L
13	Yuri Rizki, S.SiT	L
14	Rizky Adithya Pratama	L
15	Debi Wulan Dari	P
16	Hadi Susilo, S.Kom	L
17	Suci Rukmana	P
18	Akhmad Sunarman	L
19	Saidi	L
20	Syafei	L
21	Lara Dianastika, SKM	P
22	Rindu Amelia, S.Kom	P
23	Sarif Hidayat	L
24	Andre Saputra, SE	L
25	Zalkifli	L
26	Dwi Firmansyah, S.Kom	L
27	Astri Apriantika	P
28	Yuni Febrianti	P
29	Dardhurri Kurdhan	L
30	Ameilia	P
31	Hetty Herliani	P
32	Heryani, A.Md	P
33	Yulia	P
34	Rusdi	L
35	Virra Octaria, S.Kom	P

36	Vici Ajie Putra	L
37	Deffi Afrillita	L
38	Farial	L
39	Budi Setiawan	L
40	Silviatun Naila	P
41	Dhefa Ivcaris	L
42	Junaidi	L
43	Ervindra Haspuri	P
44	Senen	L
45	Hadi Kurniawan	L
46	Maya Sefriyenti	P
47	Dewi Rahayu	P
48	Enny Maritha,A.Md	P
49	Rahmania	P
50	Haji Rifat Amestu	L
51	Tiara Tasya Monica	P
52	Denabila	P
53	Eka Rimayanti	P
54	Hafiz Avidzal	L
55	Haidir Iktibar	L
56	Elvitania Restimahyumi	P
57	Suci Widianingsih	P
58	Cici Rosalina	P
59	Devita Mutiara	P
60	Sakinah	P
61	Devi Rosdiana	P
62	Suci Pradina Agustia	P
63	Etika Nova Lestari	P
64	Vivi Violeta Ariesty	P
65	Satria Kurniawan, S.P	L
66	Rudi Susanto, S.H	L
67	Achmad Iskandar, S.T	L
	Muhammad Zaky	
68	Mubarok,S.Hum	L
69	Zea Lalita Efriliani, S.Pd	P
70	Suas Robi Cahyadi, S.KM	L
71	Dyah Savitri Oktari	P
72	Ghea Elfashiera	P
73	Hariyadi	L
74	Afifah Hermawidayanti	P
75	Roma Rio Apriansyah	L
76	Erlinda Zagita	P
77	Restu Aditya	L
78	Gery Pratama	L

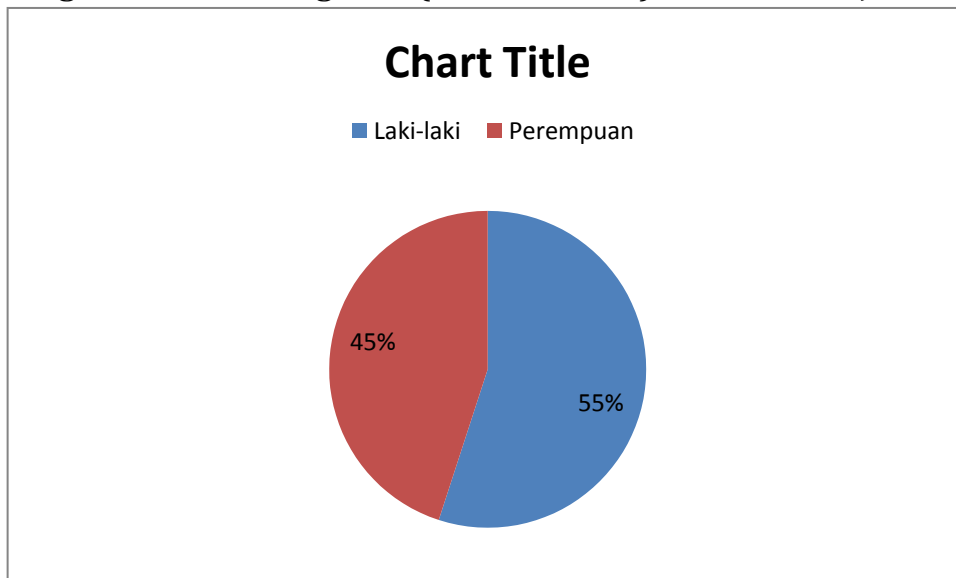
79	Novia	P
80	Aulia Dafa Andeni	L
81	Uswatun Hasanah	P
82	Meiga Adha Saputri	P
83	Rusli	L
84	Budhi Setianto	L
85	Reza Erlina	P
86	Dinda Juliana	P
87	Dera Krismunia	P
88	Shaffa Felisha Amadea	P
89	Khoidri Ocpanti	L
90	Siti Nuraliza	P
91	Hendri Yanto	L
92	Ariefo Akbar	L
93	Agung Sanjaya	L
94	Yunie Maharani	P
95	Vidi Ajie Putra	L
96	Cica Floranda	P
97	Zalfaa Rihhadatul Aisy	P
98	Misto	L
99	Gita Safitri	P
100	Erpindi	L
101	Hendrik Wijaya	L
102	Rais Abdillah	L
103	Egy ryanda	L
104	Eka Kurnia Dewi	P
105	Dian	P
106	Suriadi	L
107	Alhiv Syamsuri	L
108	Cahyadi Ferdian	L
109	Evan Maulana	L
110	Sumantri Mahbayaumi	P
111	Dedi Kalmin	L

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2022 berjumlah 149 orang terdiri dari 38 PNS, 111 PHL yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut:

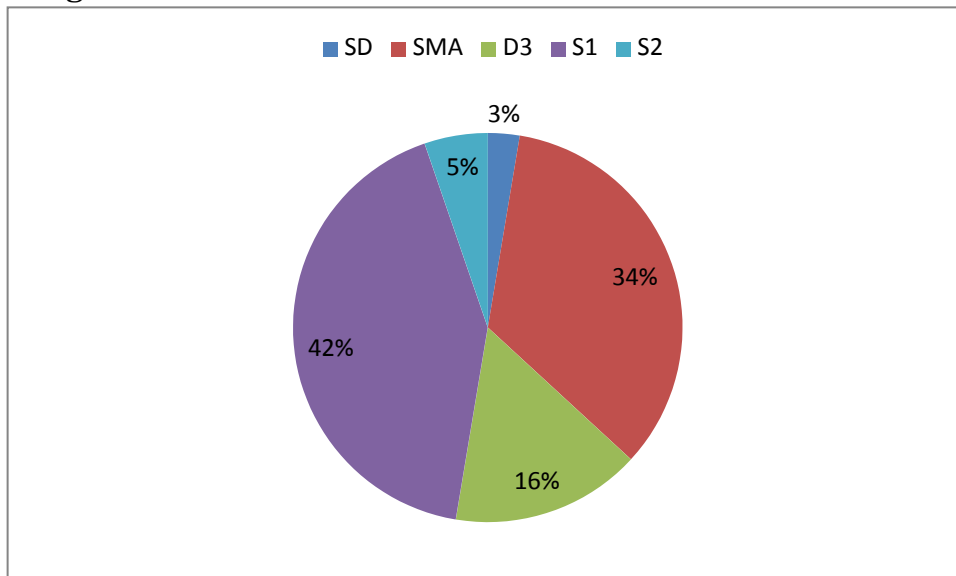
a. Diagram ASN berdasarkan Golongan



b. Diagram seluruh Pegawai (ASN dan PHL) berdasarkan Jenis Kelamin



c. Diagram ASN berdasarkan Pendidikan



3.5. Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Kantor
Bangunan kantor termasuk tanah terletak di Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang dengan luas $\pm 5.610 \text{ m}^2$.
2. Inventaris/Peralatan Kantor
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kota Pangkalpinang (data terlampir)
3. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki terdiri dari mobil dinas dan motor dinas yang diperoleh dari pengadaan APBD Kota Pangkalpinang (data terlampir)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program melalui proses penyusunan rencana strategik, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah ditetapkan melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang ingin dicapai dengan didukung indikator pencapaian kinerja dan sasaran masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai.

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berperan sebagai pelayanan terhadap anggota dewan, alat check and balance terhadap eksekutif dan alat pendorong terwujudnya *good govermance*.

4.2 Permasalahan

Disadari bahwa aspek pelayanan terhadap anggota DPRD saat ini masih dihadapkan pada permasalahan antara lain :

1. Jumlah sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi, tetapi kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi khusus di bidangnya masih kurang
2. Etos kerja dan kedisiplinan pada pegawai masih kurang
3. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kompetensinya
4. Rasa tanggung jawab terhadap tugas kurang optimal
5. Pertanggungjawaban mengenai aset terlalu rumit
6. Informasi publik terkait DPRD atau saran dan masukan bagi anggota DPRD melalui website masih kurang
7. Perencanaan kegiatan masih kurang, sehingga terjadi banyak perubahan kegiatan di tengah jalan
8. PHL masih kurang optimal pengawasannya, sehingga pekerjaan seperti administrasi perkantoran dan kebersihan kantor masih kurang.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (form-PPS) dan Pengukuran Pencapaian Kegiatan (form-PPK) Sekretariat DPRD Kota

Pangkalpinang telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk menyempurnakan organisasi sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Meningkatkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD .
3. Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD serta pelayanan masyarakat.
4. Memberikan kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memfasilitasi dan mediator hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan perencanaan kegiatan supaya dalam pemilihan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diinginkan dalam artian hasil dari kegiatan mempunyai nilai tambah sesuai dengan kebutuhan dan mengerti tentang peraturan yang berlaku sekarang.
7. Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hendaknya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dapat terwujud. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang diemban antara lain :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
8. Dilihat dari hasil pencapaian sasaran yang mencapai rata-rata 92,14%, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil dengan sangat baik. Dengan demikian capaian kinerja masing-masing sasaran telah berhasil dilaksanakan dari rencana yang ditetapkan pada tahun 2022